

DAFTAR PUSTAKA

- A, H. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, 187-195.
- Abdullah Ramadhan, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Aini, A. I. (2022). Analisis Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi E-open di Kelurahan Pejuang Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Informatika*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Albari, A. (2019). Implementasi Program Cerdas Command Center Dalam Rangka Mewujudkan Smart City. *Ilmu Pemerintahan*.
- Anggito, A. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- anggito, albi, & setiawan, j. (2018). *metologi penelitian kualitatif*.
- Annisya Dwi Mardiyani, A. (2017). Analisis Determinan Pelaksanaan E-Government Di Kota Semarang. *Jurnal Undip*, 4.
- Faidati Nur, K. (2018). Analisis Strategi Pengembangan Kota Pintar(Smart City). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Herlambang Admajaya Dwi, P. M. (2010). Evaluasi Kesiapan Implementasi Program Smart city Di Peerintah Kabupaten Malang Dengan Memakai E-Readiness. *Jurnal Ilmu Komputer*.
- Ilham, G. (2018). Strategi Branding Biro Humas Kota Bogor Dalam Pelaksanaan Program Bogor Smart City. *Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indonesia, R. (2020). *Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi*. Retrieved from Undang-Undang.
- Indrajit, R. (2006). Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi.
- Kase, J. (2010). Perencanaan Strategi Sistem Informasi Pada Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. *Tesis Universitas Gajah Mada*.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 195-224.
- Muadi, S. (n.d.). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*.
- Mustari Mohammad, R. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksbangPressindo.
- Novita, D. (2014). *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang*. Palembang: Eksplora Informatika.
- Nugraha, J. T. (n.d.). E-Governement dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kab Sleman. *Jurnal Universitas Tidar*, 36.
- Ponto, M. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisiksosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan

- Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 36-52.
- Resti Apriliani, D. (2022). Efektifitas Pelayanan Online dalam Registrasi Pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan SIPIL Kab Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Rima, K. (2015). Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*.
- Saputra Rahmat, W. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*.
- Siyoto Sandu, S. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sokat Cipta Ibnu, H. (2020). Aplikasi Layanan Aplikasi Publik Berbasis Android Pada Kantor Kelurahan Kabupaten Karawang. *Jurnal Universitas Widyagama Malang*.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif). *Jurnal Alfabeta*.
- Syaukani. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Website

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/isi/detail-190/alur-registrasi-aplikasi-e-open>

- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disebut permenpan 2007. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi. Bekasi
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 470 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan e-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan di Kota Bekasi). Bekasi
- Republik Indonesia. 2020. Instruksi Walikota Bekasi Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelayanan Kependudukan di Kota Bekasi Melalui e-Open. Bekasi
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta
- Disdukcapil Kota Bekasi. (2020). Surat Edaran Mekanisme Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi Melalui Aplikasi e-Open. BekasiKota.go.id. Website: (<https://www.bekasikota.go.id/detail/surat-edaran-mekanisemepelayanan-administrasi-kependudukan-di-kota-bekasi-melalui-aplikasi-e-open>).

Disdukcapil Kota Bekasi. (2022). Pemerintahan Kota Bekasi Sosialisasi e-Open melalui program masyarakat terkoneksi sapa warga. BekasiKota.go.id. Website:(<https://www.bekasikota.go.id/detail/pemerintah-kota-bekasi-sosialisasi-e-openmelalui-program-masyarakat-terkoneksi-sapa-warga>).

Widhiantara Rafli. (2020). Kota Bekasi Punya Aplikasi e-Open, Apa Bedanya DenganSIMPADUK?.Seword.com.Website: (<https://seword.com/umum/kota-bekasipunya-aplikasi-e-open-apa-bedanya-PTOb4W3L0N>).